

Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan Kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan

April 2021



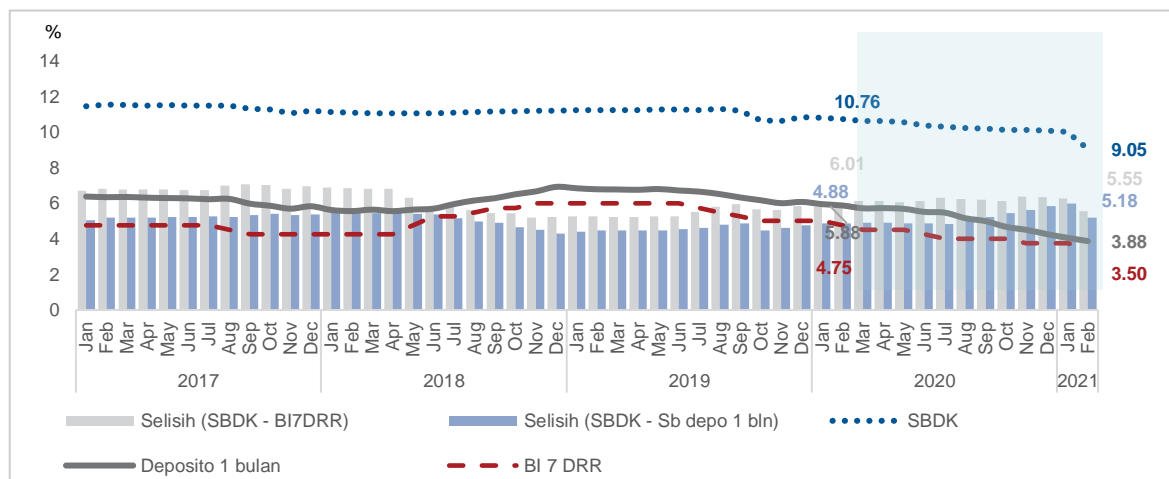
Pesan Utama

- Perbankan telah merespons penurunan Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia dengan lebih baik. Penurunan SBDK industri terutama didorong oleh percepatan penurunan SBDK kelompok bank BUMN.
- Komponen Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) mengalami penurunan lebih besar dibandingkan penurunan komponen Biaya Overhead (OHC) dan Margin Keuntungan. Komponen OHC kelompok bank BUMN dan BUSN menurun sejalan dengan perbaikan efisiensi, sementara OHC kelompok KCBA dan BPD masih meningkat.
- Di sisi lain, komponen Margin Keuntungan kelompok bank BUMN dan KCBA juga mengalami penurunan, namun Margin Keuntungan kelompok BUSN dan BPD masih menunjukkan peningkatan pada bulan Februari 2021.
- Penurunan SBDK terjadi pada seluruh jenis kredit, dengan penurunan paling dalam terjadi pada jenis kredit Mikro, meski masih merupakan jenis kredit dengan level SBDK tertinggi.

Respons Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dan suku bunga simpanan terhadap BI7DRR¹

Perbankan telah merespons penurunan Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia dengan lebih baik. Hal tersebut dicerminkan oleh SBDK yang mengalami penurunan sejak Februari 2020 hingga Februari 2021 sebesar 171 bps (yoy), sebagai respons terhadap penurunan suku bunga BI7DRR sebesar 125 bps pada periode yang sama. Dengan penurunan SBDK tersebut, selisih SBDK terhadap BI7DRR menurun dari 6,01% pada Februari 2020 menjadi 5,55% pada Februari 2021 (turun 46 bps). Adapun suku bunga deposito telah merespons penurunan suku bunga kebijakan secara lebih cepat yaitu turun sebesar 200 bps (yoy), sehingga selisih suku bunga SBDK dan suku bunga deposito 1 bulan mengalami kenaikan dari 4,88% menjadi 5,18% (naik 30 bps) (Grafik 1).

Grafik 1. Perkembangan SBDK, BI7DRR, dan Suku Bunga Deposito 1 Bulan



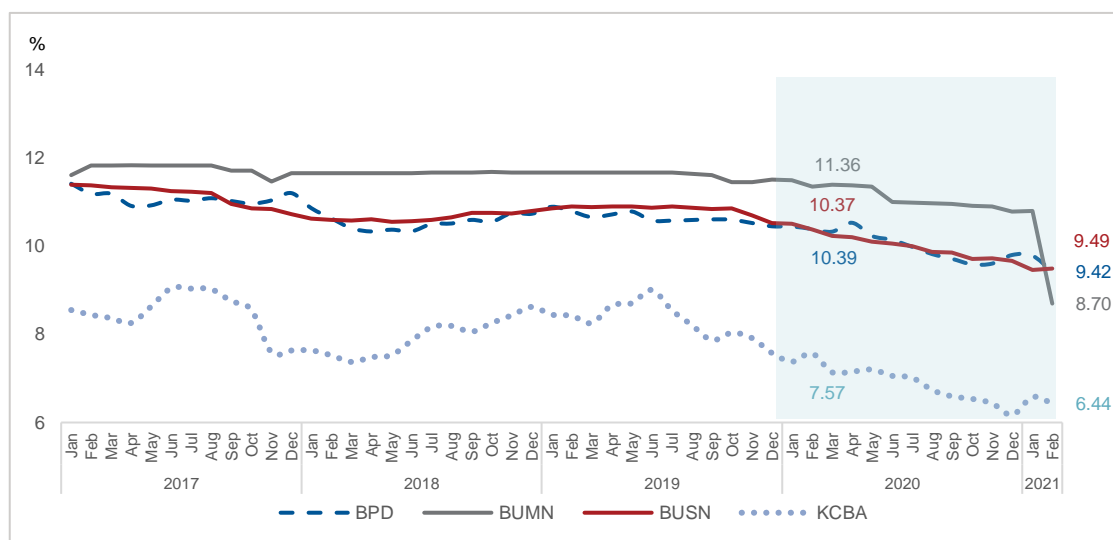
Sumber: OJK dan LBU (diolah)

¹ Periode asesmen menggunakan data yang tersedia sampai dengan akhir Februari 2021.

Perkembangan SBDK Tiap Kelompok Bank

SBDK kelompok bank BUMN menurun signifikan. Penurunan SBDK industri terutama didorong oleh penurunan yang dalam pada SBDK² kelompok bank BUMN. Pada Februari 2021, SBDK bank BUMN turun sebesar 210 bps dibandingkan bulan sebelumnya, atau turun sebesar 266 bps (yoy), lebih tinggi dibandingkan penurunan SBDK KCBA, BPD dan BUSN yang masing-masing sebesar 113 bps (yoy), 97 bps (yoy) dan 88 bps (yoy). Dengan perkembangan tersebut, SBDK Bank BUMN posisi Februari 2021 lebih rendah (8,70%) dibandingkan dengan BUSN (9,49%) dan BPD (9,42%) (Grafik 2). Bank Indonesia mengharapkan kelompok bank lain juga dapat mempercepat penurunan SBDK sebagai upaya bersama untuk mendorong kredit atau pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

Grafik 2. Perkembangan SBDK berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: OJK (diolah)

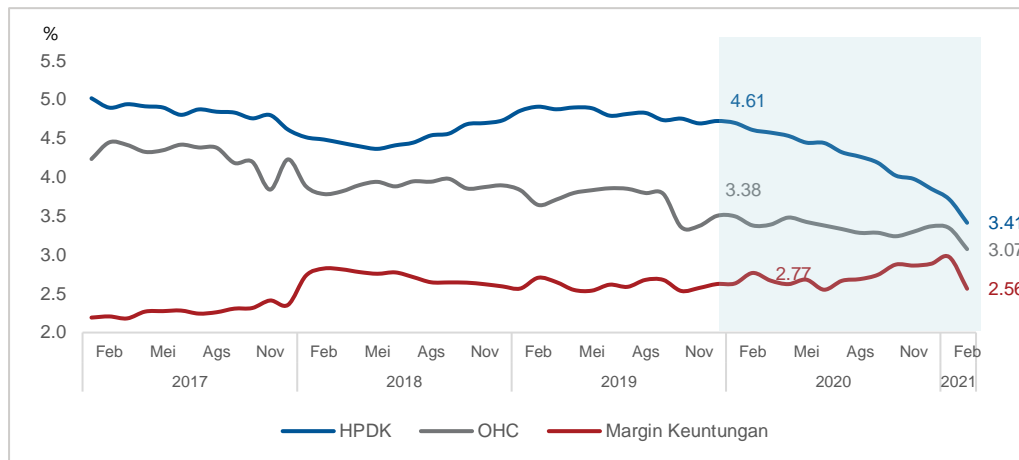
Perkembangan Komponen SBDK

Berdasarkan komponen pembentuk SBDK³, komponen Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) mengalami penurunan lebih besar dibandingkan komponen Biaya Overhead (OHC) dan komponen Margin Keuntungan. HPDK tercatat turun sebesar 120 bps (yoy) sejak Februari 2020 hingga Februari 2021. Sementara itu, OHC dan margin keuntungan masing-masing turun sebesar 31 bps (yoy) dan 21 bps (yoy) (Grafik 3).

² SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank." SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk tiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK.

³ Berdasarkan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional," SBDK terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk, yaitu (i) Harga Pokok Dana untuk Kredit yang terdiri dari biaya dana, biaya jasa, biaya regulasi, dan lainnya (HPDK); (ii) biaya overhead yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya sewa, biaya promosi dan pemasaran, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan asset tetap dan inventaris, serta biaya overhead lainnya (OHC); serta (iii) margin keuntungan, yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit.

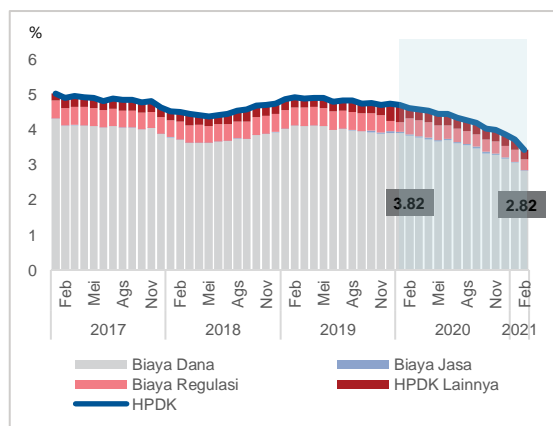
Grafik 3. Perkembangan Tiap Komponen SBDK



Sumber: OJK (diolah)

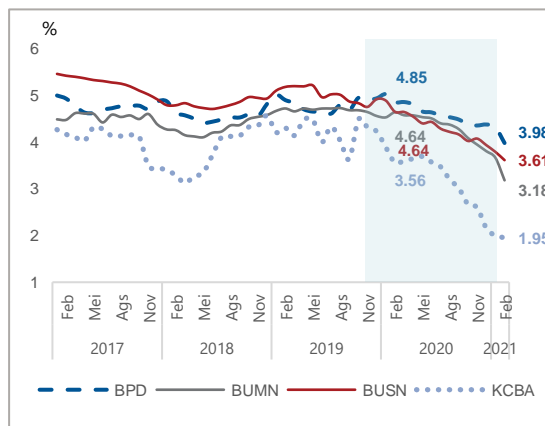
Penurunan komponen HPDK terjadi pada seluruh kelompok bank. Penurunan HPDK terutama disebabkan oleh penurunan biaya dana sebesar 100 bps menjadi 2,82% (Grafik 4). Hal ini sejalan dengan kondisi likuiditas perbankan yang sangat memadai. Kelompok KCBA, bank BUMN dan BUSN mencatat penurunan HPDK masing-masing sebesar 161 bps, 146 bps, dan 103 bps (yoy) sejak Februari 2020 hingga Februari 2021. Sementara itu, penurunan HPDK kelompok BPD masih terbatas yaitu sebesar 87 bps (yoy) (Grafik 5). Rigiditas pada kelompok BPD tersebut dipengaruhi oleh tingginya biaya dana akibat ketergantungan pada depositan besar. Hal ini tercermin antara lain dari pangsa *special rate* BPD yang paling tinggi dibandingkan kelompok bank lainnya (Grafik 6).

Grafik 4. Komponen HPDK Perbankan



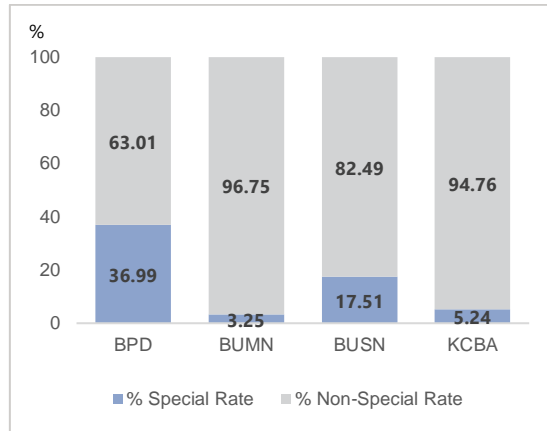
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 5. Komponen HPDK Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: OJK (diolah)

Grafik 6. Pangsa *Special Rate Terhadap Total DPK, Feb 2021**

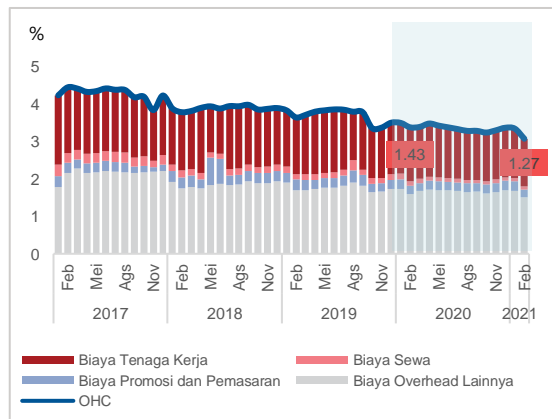


*) *Special rate*: DPK dengan bunga diatas LPS rate

Sumber: LBU (diolah)

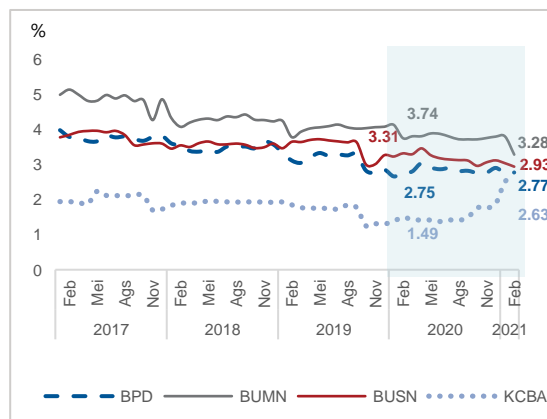
Komponen OHC kelompok bank BUMN dan BUSN mengalami penurunan sejalan dengan perbaikan efisiensi, sementara komponen OHC kelompok KCBA dan BPD masih mengalami kenaikan. Secara industri, penurunan OHC perbankan terutama disebabkan oleh penurunan biaya tenaga kerja sebesar 16 bps (yoy) (Grafik 7). Penurunan biaya tenaga kerja tersebut terjadi seiring dengan upaya perbaikan efisiensi antara lain melalui digitalisasi perbankan. OHC kelompok bank BUMN dan BUSN mengalami penurunan masing-masing sebesar 46 bps dan 38 bps (yoy). Di sisi lain, OHC kelompok KCBA dan BPD meningkat masing-masing sebesar 114 bps dan 2 bps (yoy) (Grafik 8).

Grafik 7. Rincian Komponen OHC Perbankan



Sumber: OJK (diolah)

Grafik 8. Komponen OHC Berdasarkan Kelompok Bank

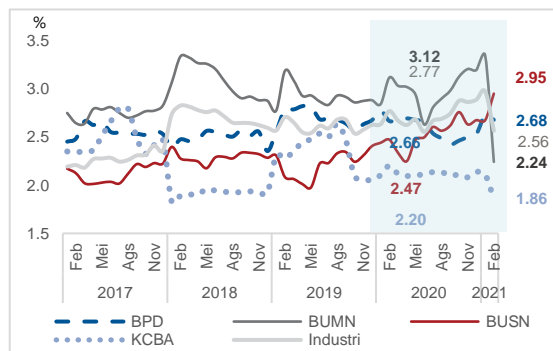


Sumber: OJK (diolah)

Komponen Margin Keuntungan kelompok bank BUMN dan KCBA mengalami penurunan, sementara Margin Keuntungan kelompok BUSN dan BPD masih menunjukkan peningkatan. Hal tersebut didorong oleh penurunan margin keuntungan BUMN dan KCBA yang masing-masing sebesar 88 bps dan 34 bps (yoy). Sementara itu, margin keuntungan pada kelompok BUSN

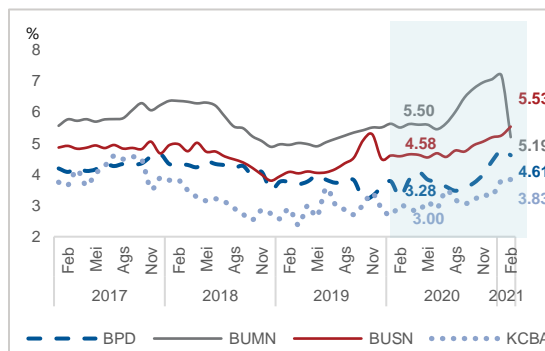
dan BPD masih meningkat masing-masing sebesar 48 bps dan 2 bps (yoy) (Grafik 9). Sejalan dengan perkembangan tersebut, selisih SBDK terhadap suku bunga deposito 1 bln BUSN tercatat paling tinggi, yaitu sebesar 5,53% (Grafik 10).

Grafik 9. Komponen Margin Keuntungan Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: OJK (diolah)

Grafik 10. Selisih SBDK terhadap Suku Bunga Deposito 1 Bulan

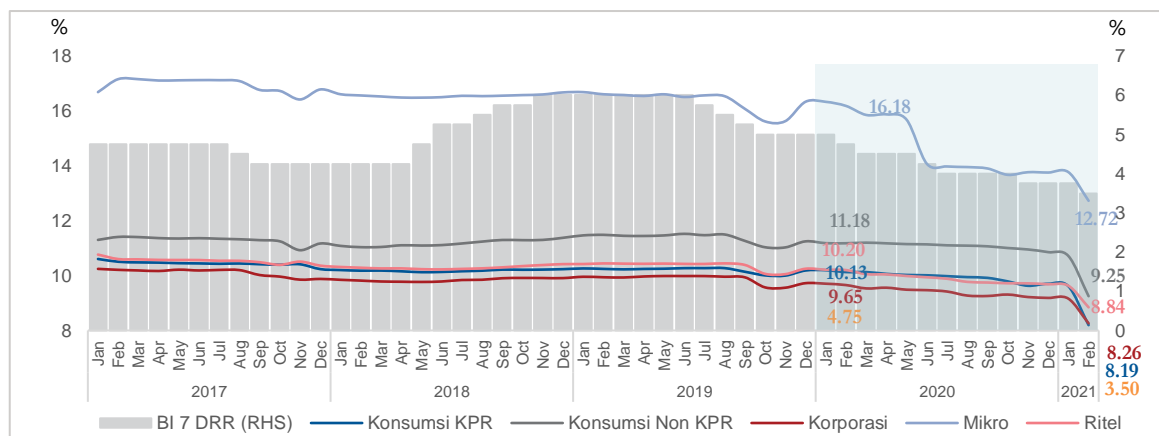


Sumber: OJK (diolah)

SBDK Menurut Jenis Kredit

Penurunan SBDK terjadi pada semua jenis kredit dengan penurunan terdalam masih pada jenis kredit Mikro, meski masih merupakan jenis kredit dengan level SBDK tertinggi. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, SBDK seluruh jenis kredit menunjukkan penurunan cukup dalam. Dengan perkembangan tersebut, selama Februari 2020 hingga Februari 2021, penurunan SBDK jenis kredit Mikro tercatat paling besar (346 bps secara yoy) menjadi 12,72%, meski masih merupakan jenis kredit dengan level SBDK tertinggi. Menurunnya SBDK kredit Mikro tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah dalam mendorong pembiayaan pada skala usaha mikro melalui pemberian subsidi bunga kredit, di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi. Sementara itu, penurunan SBDK pada jenis kredit Konsumsi (KPR dan Non KPR⁴), kredit Korporasi dan kredit Ritel masing-masing sebesar 194 bps, 193 bps, 139 bps dan 136 bps (yoy) menjadi 8,19%, 9,25%, 8,26% dan 8,84% (Grafik 11).

Grafik 11. Perkembangan SBDK berdasarkan Jenis Kredit



Sumber: OJK (diolah)

⁴ Kredit Konsumsi Non KPR tidak termasuk penyaluran melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Tujuan dari publikasi SBDK dengan asesmen ini adalah untuk memperkuat dan mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Sejak Juni 2019 BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 225bps dan melakukan pelonggaran dari sisi kebijakan makroprudensial, namun suku bunga kredit belum merespons dengan kecepatan yang sama. Oleh karena itu BI melihat masih terdapat ruang untuk dapat lebih menurunkan suku bunga kredit tersebut agar dapat sejalan dengan suku bunga kebijakan. Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha akan dapat melihat dan membandingkan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank. Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit, dalam bentuk penurunan suku bunga kredit yang sepadan, diharapkan akan mampu meningkatkan permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi.

Sebagai langkah awal, Bank Indonesia (BI) menyusun publikasi "Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan." Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit masing-masing bank yang bersifat spesifik untuk tiap bank, antara lain Harga Pokok Dana untuk Kredit, Biaya *Overhead*, dan Margin Keuntungan. Meskipun faktor-faktor tersebut cukup beragam, publikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai gambaran atas suku bunga dasar kredit perbankan Indonesia, termasuk informasi statistik distribusi suku bunga dasar kredit. Melalui publikasi asesmen ini, disamping mendorong transmisi kebijakan moneter agar lebih efektif, BI juga berupaya untuk memperluas diseminasi informasi kepada konsumen kredit baik korporasi maupun rumah tangga. Selain itu, publikasi ini bertujuan meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi dalam pembentukan suku bunga dasar kredit perbankan sehingga suku bunga dasar kredit yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dalam mendorong permintaan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Publikasi serupa merupakan sebuah praktik internasional yang sering dijumpai. Bank sentral negara lain seperti di Malaysia, India, dan Tiongkok juga meluncurkan kebijakan transparansi suku bunga kredit melalui publikasi *External Benchmark Rate*, *Loan Prime Rate*, dan *Base Rate*. IMF juga meminta tiap negara anggota untuk menyampaikan *Reference Lending Rate* dan *Reference Deposit Rate* untuk dipublikasikan sebagai selisih referensi suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan, yang merupakan salah satu *Financial Soundness Indicator* (FSI).